

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. M. Suherman. 2012. *Pengantar perbandingan sistem hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, A. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abidin, A. Z. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung.
- Achmad Ali, 2012. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Enschede, C. 2002. *Beginselen Van Strafrecht*. Deventer: Kluwer.
- Haar, T. 1962. *Adat Law In Indonesia*. Jakarta: Trans, Arthur Schiller and Adamson Hoebel, Bhartara.
- Hagen, F. E. 2013. *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode Dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hiariej, E. O. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hiariej, Eddy. 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pusaka.
- Jonkers, J. 1946. *Handboek Van Het Nederlandsch - Indische Strafrecht*. Leiden: E.J Brill.
- Kartohadikoesoemo, S. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. 1990. *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction* . Jakarta: Wisnu Basuki.
- Maschab, M. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov Fisipol Universitas Gajah Mada.

- Moeljatno. 1955. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Muljono, W. 2011. *Menguak Perkembangan Hukum adat menuju masa depan Hukum Nasional Indonesia*. Diktat Kuliah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Janabadra.
- Poerwadarminta, W. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwita, I. B. 1984. *Desa Adat dan Banjar Adat di Bali*. Denpasar: Kawi Sastra.
- R.Bintarto. 1986. *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Supriyanta. 2009. KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Wacana Hukum UNISRI*, 1.
- Suringa. 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.z
- Vos, H. 1950. *Leerboek Van Nederlands Strafrecht, Derde Herziene Druk*. Haarlem: H.D.Tjeenk Willink & Zoon.
- Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widianingsih, I. d. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Widjaja, H. 2003. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuherawan, D. S. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Setara Press.

ARTIKEL

- Adharinalti, 2012. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 1 No. 3 (2012), Hal 410.
- Abdul, Nyoman, Henny. 2017. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Diponegoro Law* Vol. VI, No. 1 (2017), Hal 1.
- Ansori, Lutfil. Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2 (2017), Hal 148-163.
- Benuf, Azhar, M. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (2020).
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary, and Ni Nyoman Ari Novarini. Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lpd Di Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis Terapan* Vol 5 No.1 (2021), Hal 23-34.
- Hestaria, Helen. 2022. Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Vol. V, No. 3 (2022), Hal 2.
- Hiarej, Edi. Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Masalah-masalah hukum* Universitas Diponegoro Jilid 42 No.1 (2013) 55-62, Hal 56.
- Krishna, I. S. 2020. Wayang Kulit Bali sebagai Media Komunikasi. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 2-3 (2020), Hal 164-171.
- Landrawan, I. Wayan, dan I. Nengah Juliawan. Eksistensi *Awig-awig* Terhadap Harmonisasi Masyarakat Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Pariksa: *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol.6 No.1 (2022), Hal 77.
- Listiono dan Dewi. Model Strategi Kebudayaan dalam pemberantas Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Review Politik* Universitas Airlangga Vol. 5, No. 1 (2015), Hal 22.
- Luntungan Natalia, Lintang Tesalonika. 2013. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen* Vol. II, No. 2 (2013), Hal 1.
- Rumajar, Johana Olivia. 2014. Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen* Vol III, No. 4 (2014), Hal 3.
- Suhendar. 2018. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Jurnal Pamulang Law Review* Vol. I, No.1 (2018), Hal 12.

- Sudika Mangku, D. G., & Rai Yuliantini, N. P. (2020). Eksistensi Desa Adat Dalam Mewadahi Komunitas Masyarakat Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, Vol.1 No.2, Hal 99.
- Suadnyana, I. B. 2020. Desa Pamasyarakat sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Penerangan Agama Hindu* Vol. 18 No.1 (2020), Hal 1.
- Sadiartha, A. A. N. G. Lembaga perkreditan desa sebagai penopang keajegan budaya ekonomi masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 7 No. 2 (2017), Hal 3.
- Putra, I. Komang Gede Triandhi Mayuda, Komang Febriyanti Dantes, dan Ni Ketut Sari Adnyani. Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Membebaskan Hak Tanggungan Pada Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 4 No. 2 (2021), Hal 290-300.
- Pudja, M. A. D., and I. P. Suartana. "Pengaruh Perputaran Kredit, Kecukupan Modal, Dan Jumlah Nasabah Pada Profitabilitas." *e-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 8. (2014), Hal. 584-597.
- Wijaya, I. Made Angga Sumara, Ketut Sudiatmaka, and Ketut Sari Adnyani. Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng). *Jurnal Pacta Sunt Servanda* Vol. 1 No.1 (2020), Hal. 1-9.
- Wiriadinata, Wahyu. Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* Vol.43, No. 1 (2013), Hal 120.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Diundangkan di Jakarta Pada 16 Agustus 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan di Jakarta Pada 21 November 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada 26 Juli Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Diundangkan Pada 31 Desember 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 2 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 15 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 /1986.

Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Diundangkan di Denpasar Pada 10 Mei 2017, Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Diundangkan di Denpasar Pada 28 Mei 2019.

INTERNET

Anandya, Diky. 2021. *Hasil Pemantauan Trem Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*.
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf> (Diakses tanggal 09 Juli 2022)

Anonim. 2021. *Pimpinan DPRD Bali terima Audiensi Badan Kerjasama LPD dan LPLPD Bali*. Tersedia di <https://sekwandprd.baliprov.go.id/pimpinan-dprd-bali-terima-audiensi-badan-kerjasama-lpd-dan-lplpd-bali/> (Diakses pada 10 Agustus 2022)

Hasan, A. M. 2022. *Usut Dugaan Korupsi LPD Anturan Buleleng, Kejari: Kerugian Negara Rp 151 Miliar*. Tersedia di <https://denpasar.kompas.com/read/2022/04/14/145214178/usut-dugaan->

korupsi-lpd-anturan-buleleng-kejari-kerugian-negara-rp-151 (Diakses pada 02 Juli 2022)

Korupsi, K. P. 2021. *Laporan Tahunan*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tersedia di <https://cms.kpk.go.id/storage/2688/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf> (Diakses pada 02 Juli 2022)

Nusabali.com. 2022. *Pengacara Bantah kerugian negara Rp.151 Miliar Kasus Dugaan penyelewengan dana LPD Anturan,Buleleng*. Denpasar: Nusabali.com. Tersedia di <https://www.nusabali.com/berita/115903/pengacara-bantah-kerugian-negara-rp-151m> (Diakses pada 03 Juli 2022)



